

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesat dan rumit. Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga ataupun perusahaan untuk membenahi kinerjanya. Hal ini turut berdampak pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat ini agar setiap tujuan dapat terlaksana dengan baik dan memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja. Terciptanya Otonomi Daerah didasari dengan suatu proses yang memerlukan transformasi paradigm dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Di sisi lain masih terdapat pula ketimpangan sosial-ekonomi akibat dari terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang rendah (miskin). Seiring perkembangan waktu, potensi meningkatnya kesenjangan hingga saat inipun masih relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat-sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan analisis ekonomi wilayah dalam perencanaan pembangunan kedepan juga

menyangkut berbagai dimensi pengukuran yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan. Indikator-indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena daerah dan dinamika daerah.

Dalam Peraturan Daerah khususnya lembaga pengelolaan keuangan daerah yang berwenang dalam hal pendapatan, anggaran, pelaporan dan asset. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagai tindak lanjut Perda dengan peraturan pelaksanaan melalui peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset tertanggal 24 Desember 2008. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah telah berupaya melaksanakan fungsi dan ketugasan yang diberikan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai institusi yang membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengemban fungsi pengelolaan keuangan daerah tersebut DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pemerintah daerah yang dijadikan perencana proyek otonomi daerah dan riset telah memprakarsai untuk menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dipublikasikan.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang disertai tugas tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Provinsi Jawa Tengah sudah terealisasi dengan baik atau tidak. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sejak perencanaan anggaran, seperti yang tertuang dalam Rencana Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Analisis Rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah pada periode tersebut.

Sesuai dengan uraian diatas maka judul laporan tugas akhir yang penulis pilih adalah **“ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2016”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Agar penulisan Tugas Akhir ini lebih terarah dan setiap bahasan yang diuraikan dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai prosedur penjualan langsung yang dibatasi pada:

1. Pengertian anggaran pemerintah, belanja daerah.
2. Manfaat penyusunan anggaran.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran.
4. Kegunaan belanja daerah.
5. Klasifikasi anggaran belanja daerah.
6. Laporan anggaran belanja daerah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.
7. Analisis realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2014-2016.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Suatu kegiatan dilakukan karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan yang jelas maka kegiatan akan lebih terarah. Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Untuk menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan praktik yang dilaksanakan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui Kinerja keuangan pelaksanaan Belanja Daerah pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dan anggaran sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran belanja daerah pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Disamping mempunyai tujuan, penulisan Laporan Tugas Akhir ini juga mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran pada instansi pemerintah.
  - b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah untuk diterapkan dalam perusahaan/lembaga langkah nyata dalam penyusunan anggaran belanja.
  - c. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan Instansi.
2. Bagi Instansi
  - a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi karyawan.
  - b. Sebagai masukan dan saran bagi instansi guna meningkatkan kinerja keuangan.

3. Bagi Akademik
  - a. Merupakan salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai oleh mahasiswa.
  - b. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait.
  - c. Dapat mewakili eksistensi program studi.
  - d. Sebagai referensi bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
  - e. Untuk menambah koleksi perpustakaan yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bagi Pihak Lain
  - a. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan analisis anggaran belanja daerah pada instansi Pemerintah.

#### **1.4 Metodologi Penulisan**

Metodologi adalah kerangka teoritis yang dipergunakan untuk menganalisa, mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan kerangka teoritis atau kerangka ilmiah adalah metode-metode ilmiah yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas (Gory Keraf, 1993:310).

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis memerlukan data yang berhubungan dengan pokok bahasan agar sasaran yang dapat tercapai sesuai dengan data yang penulis peroleh di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah. Beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah :

##### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya (Mason dalam Sujoko Efferrin, dkk, 2008:327). Dalam hal ini, pengamatan (observasi) dilakukan dengan

cara melaksanakan praktik kerja secara langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam hal pengamatan ini, penulis salah satunya mengamati tentang laporan anggaran dan realisasinya yang sudah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai atau *interviewee* (Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani, 2007:14). Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal wawancara ini, penulis salah satunya menanyakan kenapa di laporan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak ada pendapatan.

## 3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data ini dapat dikumpulkan kembali untuk digunakan dalam kerangka riset yang berbeda (HM. Sonny Sumarsono, 2004:70). Pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam buku yang berkaitan dengan analisis anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

### 1.4.2 Jenis Data

#### 1. Jenis Data Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu (Juliandi, dkk, 2014:65). Dari data ini diperoleh gambaran umum, struktur organisasi, bidang usaha, logo instansi, mekanisme pelayanan perizinan, metode penyusunan anggaran belanja daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi, dkk, 2014:65). Data ini dapat berupa data tentang laporan realisasi anggaran tahun 2014-2016.

#### 2. Jenis Data Menurut Sumbernya

Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a. Data Primer

Data eksternal primer atau data primer adalah data eksternal yang diperoleh melalui upaya sendiri (Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani, 2007:12). Data primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dan observasi terhadap objek yang diteliti. Data primer yang diperoleh meliputi:

- 1) Sejarah singkat Instansi
- 2) Bentuk dan bidang usaha Instansi
- 3) Analisis realisasi anggaran belanja daerah

##### b. Data Sekunder

Data eksternal sekunder yang juga lebih sering disebut data sekunder (*secondary data*) merupakan data eksternal dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga,

atau perusahaan di mana data eksternal itu berasal dari atau diterbitkan oleh kalangan lain (Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani, 2007:13). Data sekunder yang penulis peroleh berasal dari buku-buku dan literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

### **1.4.3 Metode Penulisan**

Metode penulisan Tugas Akhir ini menggunakan bentuk deskripsi. Bentuk deskripsi merupakan suatu bentuk penulisan yang berusaha untuk memindahkan kesan atas objek (tertentu) atas dasar fakta yang ada, sehingga pembaca memperoleh gambaran atas objek yang bersangkutan (Setyadi, 2010:23). Bentuk ini digunakan untuk menyusun Analisis laporan realisasi anggaran belanja dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Pengamatan**

### **1.5.1 Lokasi Pengamatan**

Pengamatan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Jalan Mgr Soegiyopronoto No 1, Semarang.

### **1.5.2 Waktu Pengamatan**

Pengamatan dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan. Pada tanggal 3 April sampai 31 April 2017.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Tugas Akhir ini ditulis dengan menggunakan sistematika tertentu dengan tujuan agar penulisan lebih terarah dan sistematis. Dalam sistematika penulisan ini disampaikan mengenai gambaran umum tentang masalah yang akan disampaikan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:



**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, dan ruang lingkup pembahasan masalah. Selain itu juga dibahas mengenai masalah teknik pengumpulan data, waktu dan lokasi pengamatan, dan sistematika penulisan laporan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya instansi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga diuraikan struktur organisasi, bidang kegiatan atau usaha dan sebagainya yang berhubungan dengan instansi terkait.

**BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan teori yang berisi pengertian anggaran pemerintah, belanja daerah, manfaat penyusunan anggaran, fungsi anggaran belanja daerah dan tinjauan praktek yang berisi analisis realisasi anggaran belanja oleh penulis.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan atau rangkuman penjelasan yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan topik yang telah ditulis di bab III.